

**LAPORAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANTUL**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, segala limpahan Rahmat dan karunianya, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dapat kami selesaikan tepat waktu.

Laporan kegiatan FKP ini disusun sebagai bentuk / bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Laporan ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan FKP ini. Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbang saran dan ide yang membangun sangat kami harapkan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya Masyarakat pengguna layanan penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Bantul, 18 Oktober 2024

Kepala Satuan, A



**R. JATI BAYUBROTO, S.H., M.Hum.**

NIP. 197005251990031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tujuan dan Manfaat .....	1
3. Ruang Lingkup .....	2
II. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP .....	2
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	2
2. Penyelenggara dan Peserta FKP .....	2
3. Metode Pelaksanaan FKP .....	2
4. Susunan Acara FKP .....	3
III. HASIL PELAKSANAAN FKP .....	3
1. Identifikasi Masalah .....	3
2. Analisis .....	3
3. Rencana Aksi .....	3
IV. PENUTUP .....	4
V. LAMPIRAN .....	5

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan . Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/ penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana Masyarakat dan/atau penerima layanan lainnya dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilaksanakan Forum Kosultasi Publik (FKP) atas standar pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan harapan bisa memperbaiki sistem pelayanan yang sudah berjalan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan penerima layanan.

### **2. Tujuan dan Manfaat**

#### **a. Tujuan**

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat : Memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan aspirasi terkait isu-isu tertentu.
- Transparansi : Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah atau lembaga lain.
- Meningkatkan Kualitas Kebijakan: Mengumpulkan beragam perspektif yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih inklusif.

#### **b. Manfaat**

- Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Informasi dan masukan dari masyarakat dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan solusi yang lebih relevan.
- Pembangunan Komunitas: Mendorong kolaborasi dan hubungan antarwarga dan stakeholders, menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dihasilkan.
- Pencegahan Konflik: Dengan memberikan ruang untuk dialog, forum ini dapat membantu mencegah potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Secara keseluruhan forum konsultasi 2eseha berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan 2esehatan2, memfasilitasi komunikasi yang konstruktif dan membantu menciptakan kebijakan yang lebih 2esehatan2 dan akuntabel.

### **3. Ruang Lingkup**

- a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. Survei kepuasan 2esehatan2; dan
- c. Kebijakan lain terkait pelayanan 2eseha.

## **II. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Hari / Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024

Tempat : Ruang Rapat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

### **2. Penyelenggara dan Peserta FKP**

- a. Penyelenggara : Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
- b. Peserta FKP :

1. Unsur Satpol PP Kabupaten Bantul
2. Unsur BPKPAD Kabupaten Bantul
3. Unsur Bagian Hukum Setda Bantul
4. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
7. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
8. Unsur Dinas PUPKP Kabupaten Bantul
9. Unsur DKUKMPP Kabupaten Bantul
10. Unsur DKPP Kabupaten Bantul
11. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
12. Unsur DISNAKERTRANS Kabupaten Bantul
13. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

### **3. Metode Pelaksanaan FKP**

Pelaksanaan FKP dengan metode tatap muka yaitu rapat koordinasi secara *offline*.

#### **4. Susunan Acara FKP**

- a. Pembukaan
- b. Sambutan
- c. Pemaparan maksud kegiatan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Diskusi / Tanggapan / Dialog
- e. Penandatanganan Berita Acara
- f. Penutupan

### **III. HASIL PELAKSANAAN FKP**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah selama ini terfokus pada masing-masing OPD teknis/ Pengampu sehingga keterlibatan Satpol PP khususnya PPNS masih sangat minim.

Pada saat rapat koordinasi masing-masing perwakilan menyampaikan masukan terkait pengawasan perda/perkada pada berbagai sektor. Dapat ditarik Kesimpulan bahwa OPD teknis mengalami berbagai kesulitan khususnya pada saat pengawasan dan terjadi pelanggaran perda/perkada.

#### **2. Analisis**

Dari identifikasi masalah diatas dapat diketahui poin dari permasalahan yaitu belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar OPD Teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga dibutuhkan wadah atau sarana koordinasi untuk memudahkan komunikasi dan penyelesaian setiap permasalahan pelanggaran perda/perkada.

#### **3. Rencana Aksi**

- a. Pembentukan Sekretariat PPNS Kabupaten Bantul
- b. Dalam penyelesaian permasalahan penegakan perda/perkada akan dibuatkan gelar perkara di Sekretariat PPNS

#### IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Komunikasi Publik ini maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berkomitmen :

1. Untuk bisa meningkatkan koordinasi penegakan perda/perkada antar OPD teknis dan Satpol PP Kabupaten Bantul;
2. Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan 4esehatan di Satpol PP Kabupaten Bantul;
3. Partisipasi dan dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Bantul, 18 Oktober 2024

Kepala Satuan, }



**R. JATI BAYUBROTO, S.H., M.Hum.**

NIP. 197005251990031002





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

*ꦩꦭꦸꦧꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦶꦥꦸꦥꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦥꦫꦗ*

Komplek Pemda II Bantul Jl.Tentara Pelajar Lingkar.Timur Manding, Tlirenggo Bantul  
Kode Pos 55714 Telepon:(0274)367509 Psw 405,407  
Posel: [satpolpp@bantulkab.go.id](mailto:satpolpp@bantulkab.go.id) Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

**LAMPIRAN**

Surat Nomor : B/500.11.11.3/02265  
Perihal : Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Pelayanan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Yth:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
9. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
11. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Bantul
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
15. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
16. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
17. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
18. ....



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.

## LAMPIRAN II

### Berita Acara Yang Ditandatangani



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

ꦱꦠꦺꦥꦺꦥꦸꦥꦏꦁꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦏꦧ

Komplek Pemda II Bantul Jl. Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding, Trirenggo Bantul  
Kode Pos 55714 Telepon: (0274)367509 Psw 405,407  
Posel: [satpolpp@bantulkab.go.id](mailto:satpolpp@bantulkab.go.id) Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

#### BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

PUBLIK SEKTOR PELAYANAN PENEGAKAN PERDA/ PERKADA DAN PENYELENGGARAAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini, Kamis, 17 Oktober 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Penegakan Perda/ Perkada dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Kurang optimalnya koordinasi penegakan perda/perkada di wilayah Kabupaten Bantul	Pembentukan Sekretariat PPNS Kabupaten Bantul	1 (satu) bulan
		Dalam penyelesaian permasalahan penegakan perda/perkada akan dibuatkan gelar perkara di Sekretariat PPNS	Disesuaikan pada saat diperlukan adanya gelar perkara.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Bantul, 17 Oktober 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	NO HP	TANDA TANGAN
1.	Kurniawan, Anis Y	L	sat pol PP	08213365 0066	
2.	Sri Hartati, SH	P	satpol PP	08777726 3323	



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

ꦱꦠꦸꦥꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦱꦠꦸꦤꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Komplek Pemda II Bantul Jl. Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding, Trirenggo Bantul  
 Kode Pos 55714 Telepon: (0274)367509 Psw 405,407  
 Posel: [satpolpp@bantulkab.go.id](mailto:satpolpp@bantulkab.go.id) Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

No.	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	NO HP	TANDA TANGAN
3.	Misman	L	DKPP	081598978902	
4.	Sri Setatiningsih	P	Dinkes	0812277266	
5.	Coardana p	L	Dkukwpp	081315065030	
6.	Wahyu	L	Distub	08179864649	
7.	Ichsan	L	DH	08122994569	
8.	Sri Romangsih	P	OPTR	0892353372422	
9.	Ani NF	P	Dep	0895421453742	
10.	Puji W	L	DRUPKP	0811252917	
11.	HARMIDHARTO	L	BKPAD	081328894948	
12.	Yahya A	L	Disnaker	085693271112	
13.	Winda Anandani	P	Disnakertrans	085292672345	
14.	Zuhdan Andhika Rasyi	L	Satpol PP	083867690455	
15.	Warah Arza	P	Dispar	081328708975	
16.	Jaro K.	L	Sony Telen	085201835610	
17.	Laita Saras D	P	Satpol PP	08388056577	

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN

**AMBAR SUTADI, SH., M.H.**  
 NIP. 197307311994021002

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BANTUL

**R. JATI BAYU BROTO, SH., M.Hum**  
 NIP. 197005251990031002

LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA - TANGAN	
1	Jah - 3	Sat Pol PP	1	[Signature]
2	Agung	Satpol PP	2	[Signature]
3	M. Sidiq	BKPP	3	[Signature]
4	Klabayi	Disub	4	[Signature]
5	Indha	Dhukpp	5	[Signature]
6	Ihsan	DLA	6	[Signature]
7	S. Betaningsi	OPTR	7	[Signature]
8	Solikhah Patnaningsih	Dinkes	8	[Signature]
9	HANMIDARTO	BPK DAN	9	[Signature]
10	Puji W.	DPUPKP	10	[Signature]
11	Ami HF	DKE	11	[Signature]
12	Yahya A.	Disnakertrans	12	[Signature]
13	Winda Anandari	Disnakertrans	13	[Signature]
14	Zuhdan Andhika Rosy	Satpol PP Bantul	14	[Signature]
15	Wahli A.	Dispar	15	[Signature]
16	Jude B.	Booy Terkem	16	[Signature]
17	ew fuzous	Satpol PP KIL	17	[Signature]
18	Budiman	Satpol PP	18	[Signature]
19	Mesir Ahmad	Satpol PP	19	[Signature]
20	Hendat Pramono	Satpol PP	20	[Signature]
21	Gunung AP.	Satpol PP	21	[Signature]
22	Emma Samandi	Pol PP	22	[Signature]
23	EKO FERDI	PATPOL PP	23	[Signature]
24	Su Wardi	Satpol PP	24	[Signature]
25	Novia Wenita	Satpol PP	25	[Signature]

**LAMPIRAN IV**

**Dokumentasi Kegiatan**





## LAMPIRAN V

### Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦱꦶꦥꦸꦤꦶꦥꦩꦺꦤꦶꦥꦫꦶꦗ

Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711 Telepon: (0274)367509 Psw 405,407  
Posel: [satpolpp@bantulkab.go.id](mailto:satpolpp@bantulkab.go.id) Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

Bantul, 21 September 2023

Kepada

Nomor : B/000.1.10/00732  
Sifat : Biasa  
Lampiran : .....  
Hal : Undangan

Yth. 1. Bupati Bantul  
2. Wakil Bupati Bantul  
3. Pasi Intel Kodim 0729 Bantul  
lewat Komandan Kodim 0729  
Bantul  
4. Ka. Sat Binmas Polres Bantul  
Lewat Ka. Polres Bantul  
5. Ka. Kesbangpol Kab. Bantul  
di – Bantul

Dengan Hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Schubungan dengan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul akan menyelenggarakan Kegiatan Silaturahmi Mitra Satpol PP dengan mengundang Organisasi Masyarakat (Ormas) di wilayah Kabupaten Bantul yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 27 September 2023  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Rumah Makan Parangtritis  
Jl. Parangtritis KM 9 Gabusan, Sewon, Bantul  
Acara : Forum Group Discussion Pelatihan Ketrampilan Masyarakat terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Silaturahmi Mitra Satpol PP)

Schubungan dengan hal itu, kami mohon berkenan Bapak Bupati untuk dapat hadir dan memberikan arahan pada kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Pt. KASATPOL PP KAB. BANTUL



**RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197005251990031002



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN

Nomor : B/000.1.10/00732  
Hal : Undangan

Unsur yang di Undang :

1. Bupati Bantul
2. Wakil Bupati Bantul
3. Pasi Intel Kodim 0729 Bantul lewat Komandan Kodim 0729 Bantul
4. Ka. Sat Binmas Polres Bantul Lewat Ka. Polres Bantul
5. Ka. Kesbangpol Kab. Bantul
6. Ka. Paksikaton Kab. Bantul ( 2 Orang )
7. Ka. Senkom Kab. Bantul ( 2 Orang )
8. Ka. RAPI Kab. Bantul ( 2 Orang )
9. Ka. ORARI Kab. Bantul ( 2 Orang )
10. Ka. BANSER Kab. Bantul ( 2 Orang )
11. Ka. KOKAM Kab. Bantul ( 2 Orang )
12. Ka. FPRB Kab. Bantul ( 2 Orang )
13. Ka. Pemuda Pancasila Kab. Bantul ( 2 Orang )
14. Ka. Jagasatru Parangtritis ( 2 Orang )
15. Ka. Paguyuban Jagabaya Tunggal wulung kab. Bantul ( 1 Orang )
16. Ka. Pantas Kretek ( 1 Orang )
17. Ka. RKS B Dlingo ( 1 Orang )
18. Ka. TRC Gamping ( 1 Orang )
19. ....



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Hari  
Tanggal  
Jam  
Acara

Rabu  
27 September 2023  
08.30 WIB - Selesai  
Pelatihan Ketrampilan Masyarakat

NO	NAMA	ALAMAT/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1	EDI SURYO ISMOYO	SENKUM	1
2	ATO R	SENKUM	
3	SUWARSONO	PANCASIA	3
4	GUWINDO	TRC Gamping	
5	AGUS SP	ORARI	5
6	SABIRI	PARI	6
7	WINDO	PARI	7
8	M SANTOSO	PASIAKATUN	8
9	AGUNG	PASIKATUN	9
10	SUWARDI	PARI	10
11	SAPTAPA WISNU AJI	JOGORAYA	11
12	KUNCORO	BANJAR	12
13	SAKDUN M	BANJAR	13
14	ARI F	PEMUDA PANCASILA	14
15	AGUNG PRASETYO	KODIM	15
16	SUDIRA	KODIM	16
17	PARWOTO	BANJAR	17
18	YUNUS		18
19	ALFANDI	HERGIPAL	19
20	WALJITO	TRK BA.	20
21	HARJUNO	FRK MAI	21
22	HSAN	KOKAM	22
23	HERWANTO	KOKAM	23
24	FAUZI AN	ORARI	24
25	MAHENDRO	PEMUDA PANCASILA	25
26	M HIDAYAT	PEMUDA PANCASILA	26
27	BAGAS	SATPOL PP Bantul.	27
28	DIOM	POLDA DIY	28
29	DALHARI	SATPOL PP	29
30	FATNO WIBOWO	POL PR	30

31	WAKHID AHMAJI	SATPOL PP	31	
32	SULISTYO ARDHI WIBOWO	SATPOL PP		32
33	KOMARDUIN	SATPOL PP	33	
34	DANANG UTAMTO	SATPOL PP		34
35	EKO FERDIYANTO	SATPOL PP	35	
36	KUWADI	SATPOL PP		36
37	PRASTUHA NANDHA	SATPOL PP	37	
38	ABU SUFYAN	SATPOL PP		38
39	ISWANTORO	SATPOL PP	39	
40	ADIK TRI P	SATPOL PP		40
41	MEI TESKA	SATPOL PP	41	
42	MUHAMMAD FAJAR	SATPOL PP		42
43	JENDRO AGUNG	SATPOL PP	43	
44	HAJAR ROHADI	SATPOL PP		44
45	GILANG KRISMA	SATPOL PP	45	
46	DANANG UTAMTO	SATPOL PP		46
47	RENGGA ARDHI	SATPOL PP	47	
48	IKHSAN PRADANA	SATPOL PP		48
49	EKO HERI	SATPOL PP	49	
50	MUHAMMAD GALIH	SATPOL PP		50

27-Sep-23

Kasi Ketertiban Umum

  
Eko Wahyudi, S.Sos.MM  
NIP.197001141992031003

## HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Dengan ini kami laporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada:

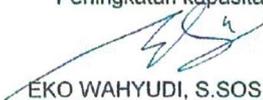
Hari : Rabu  
Tanggal : 27 September 2023  
Waktu : 08.30 s/d selesai  
Tempat : Rumah Makan Parangtritis Sewon Bantul  
Acara : Forum Group Discussion Ketenteraman dan Ketertiban Umum bersama dengan Mitra Satpol PP

Adapun hasil yang dapat Kami laporkan :

- 1 Melaksanakan kegiatan FGD ketenteraman dan ketertiban umum bersama dengan Mitra Satpol PP
- 2 Kegiatan FGD ketenteraman dan ketertiban umum bersama dengan Mitra Satpol PP dilaksanakan dengan mengundang perwakilan dari warga sejumlah 50 orang.
- 3 Kegiatan FGD ketenteraman dan ketertiban umum bersama dengan Mitra Satpol PP dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat terkait pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah masyarakat.
- 4 Kegiatan FGD ketenteraman dan ketertiban umum menjelaskan antara lain :
  - a. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan
  - b. Tertib Sungai, Saluran dan Kolam
  - c. Tertib Lingkungan Masyarakat
  - d. Tertib Bangunan Gadung
  - e. Tertib Sosial
  - f. Tertib Pemandokan
- 5 Dengan kegiatan FGD ketenteraman dan ketertiban umum bersama dengan Mitra Satpol PP ini diharapkan warga masyarakat dapat mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah masing-masing.

Bantul 27 September 2023

Ka. Seksi Ketertiban Umum dan  
Peningkatan kapasitas

  
EKO WAHYUDI, S.SOS,MM  
NIP. 197001141992031003



Dipindai dengan CamScanner

